

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

**RENJA
2023**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KETAPANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 ini dapat di selesaikan.

Penyusunan Renja dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Ketapang. Pemahaman yang cermat terhadap program strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang maupun langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang disusun agar dapat dijadikan pedoman untuk Bidang dan Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan agar kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengarah pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Ketapang, 26 Juli 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang,

H RUSTAMI, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630512 198511 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG	12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan	12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	13
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan....	14
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
B. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan	24
C. Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Ketapang
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ketapang
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Ketapang
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
Tabel 3.3	Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Ketapang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 tahun 2004. Pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Selain dari itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes Nomor 4 tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Kabupaten Ketapang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Ketapang adalah $\pm 31.588 \text{ km}^2$ atau 21,3 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan masih merupakan Kabupaten terluas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 Kecamatan dengan 9 Kelurahan dan 253 Desa.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kendawangan dengan luas wilayah $\pm 5.859 \text{ km}^2$ atau 18,55% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Ketapang, sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Delta Pawan yaitu $\pm 74 \text{ km}^2$ atau 0,23% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang periode 2021-2026 adalah **"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam enam misi. Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Kesehatan di suatu Wilayah. Sehingga terkait dengan Visi dan Misi diatas, Dinas Kesehatan mempunyai tujuan dari misi ketiga yaitu: **"Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing"**. Selain dari itu, dalam menjalankan kepemimpinannya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang memiliki program prioritas yang tertuang didalam lima panca karya. Dinas kesehatan melaksanakan panca karya **"Ketapang Sehat"** yang merupakan panca karya yang pertama.

Secara umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang telah menunjukkan berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) orang di Kabupaten Ketapang telah naik mengikuti tren kenaikan AHH global. Pada tahun 2015 AHH orang Ketapang sebesar 70.51 dan naik menjadi 71.11 pada tahun 2021. Pendekatan terbaru tidak semata-mata untuk melihat tahun hidup (AHH), namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (*Healthy Adjusted Life Expectancy/HALE*). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya jika di kaitkan dengan AHH orang di Kabupaten Ketapang, maka terdapat 8,45 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Permasalahan lain yang ada di Kabupaten Ketapang yakni masih terdapat kecenderungan naik turun untuk Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). *Prevalensi stunting* pada balita sudah cenderung menurun namun penurunan *prevalensi stunting* belum terlihat secara *signifikan*. Selain dari itu, jika dilihat dari beban penyakit di Kabupaten Ketapang mengalami beban ganda, di satu sisi Penyakit Tidak Menular (PTM) naik dengan *signifikan*, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit yang baru muncul, khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit *zoonosis*, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Melihat tingginya mobilisasi keluar masuk tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri dan terbukanya transportasi di Kabupaten Ketapang berpotensi masuknya agen penyakit baru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan melalui perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terarah dan sistematis. Perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021–2026 dan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023 yang diperoleh melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dilakukan mulai pada tingkat Desa/ Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrenbang Tingkat Provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan dokumen awal perencanaan pembangunan kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memuat kerangka program, kegiatan dan pendanaannya. Dengan tersusunnya rencana kerja tahunan ini diharapkan menjadi arah pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2022 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

39. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 94);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan;
- b. terselenggaranya pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. mendiskripsikan program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
- b. menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
- c. menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
- d. meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
- e. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan, dan Penelaahan Usulan Program Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan menguraikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan serta Program dan Kegiatan dari Dinas Kesehatan.
- BAB IV Penutup, menguraikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan hasil kinerja dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penetapan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ketapang didasarkan kepada analisis berbagai potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan nasional bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 (T-C.29) di bawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022
	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (6+7+9)	11 = (10/8)
1.02	URUSAN WAJIB KESEHATAN						73,01		88,09
1.02.01	DINAS KESEHATAN						73,01		88,09
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA						81,81		90,56
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	90 persen		70 persen	70 persen	82,50	80 persen	85,00
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	79,09	8 dokumen	85,00
X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
X XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
X XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan		6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	85,53	- laporan	- laporan	-
X XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan		1 laporan		- laporan	- laporan	-	- laporan	- laporan	-
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	100 persen	89,41	100 persen	100 persen	94,94
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 orang / bulan		784 orang / bulan	784 orang / bulan	784 orang / bulan	784 orang / bulan	89,55	784 orang / bulan	784 orang / bulan	95,00
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	49,55	4 dokumen	4 dokumen	71,00
X XX 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen		1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan		3 laporan		3 laporan	3 laporan	31,71	3 laporan	3 laporan	71,00
X XX 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 laporan		4 laporan		4 laporan	4 laporan	45,65	4 laporan	4 laporan	71,00
X XX 01 2.02 08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen		2 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	90 persen		90 persen	-	80 persen	80 persen	-	85 persen	85 persen	-
X XX 01 203 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 203 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022
			4	5	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			1 laporan		- laporan	- laporan	-
X XX 01 203 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		- laporan	- laporan	-
X XX 01 203 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		- laporan	- laporan	-
X XX 01 203 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		- laporan	- laporan	-
X XX 01 203 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		- laporan	- laporan	-
X XX 01 203 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	90 persen	80 persen	85 persen	85 persen	-
X XX 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit		- unit	- unit	-
X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		- paket	- paket	-
X XX 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-
X XX 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 orang		- orang	- orang	-
X XX 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 laporan		- laporan	- laporan	-
X XX 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahkan tugas	10 orang		- orang	- orang	-
X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang		- orang	- orang	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022						
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X XX 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang		- orang	- orang	- orang	- orang	-	- orang	- orang	-
X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang		- orang	- orang	- orang	- orang	-	- orang	- orang	-
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang terpenuhi	90 persen	-	70 persen	90,50	80 persen	80 persen	90,27			
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	77,08	1 paket	1 paket	82,00			
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		- paket	-	- paket	- paket	-			
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		- paket	-	- paket	- paket	-			
X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00			
X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket	85,74	1 paket	1 paket	87,00			
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen		1 dokumen	77,13	1 dokumen	1 dokumen	80,00			
X XX 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket		- paket	-	- paket	- paket	-			
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan		- laporan	-	- laporan	- laporan	-			
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan		2 laporan	95,26	2 laporan	2 laporan	98,00			
X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-			
X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen		- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-			
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	90 persen	-	70 persen	96,78	80 persen	80 persen	99,00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		1 unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		1 unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	97,20	1 unit	1 unit	99,00
X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit		1 unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit		25 unit	15 unit	15 unit	15 unit	95,94	18 unit	18 unit	99,00
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen		90 persen	70 persen	70 persen	70 persen	87,64	80 persen	80 persen	98,64
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	79,27	1 laporan	1 laporan	85,00
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	99,42	1 laporan	1 laporan	99,00
X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan		1 laporan	- laporan	- laporan	- laporan	-	- laporan	- laporan	-
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	83,84	- laporan	- laporan	-
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen		90 persen	70 persen	70 persen	70 persen	43,12	80 persen	80 persen	53,76
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit		10 unit	25 unit	25 unit	25 unit	99,34	6 unit	6 unit	99,00
X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit		8 unit	16 unit	16 unit	16 unit	80,97	4 unit	4 unit	85,00
X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit		100 unit	94 unit	94 unit	94 unit	63,75	52 unit	52 unit	85,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		3 unit	3 unit	31,74	1 unit	1 unit	71,00
X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit		1 unit	1 unit	38,47	1 unit	1 unit	85,00
X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit		1 unit	1 unit	23,87	1 unit	1 unit	85,00
X XX 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD yang terpenuhi	90 persen	-	70 persen	70 persen	62,29	80 persen	80 persen	75,00
X XX 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 unit kerja		24 unit kerja	24 unit kerja	62,29	24 unit kerja	24 unit kerja	75,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			13.305,58			68,71			85,56
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			13.305,58			64,63			79,46
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	90 persen	-	80 persen	80 persen	74,65	85 persen	85 persen	86,57
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit		1 unit	1 unit	61,32	- unit	- unit	-
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun	3 unit		2 unit	2 unit	74,34	1 unit	1 unit	85,00
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	9 unit		6 unit	6 unit	43,28	6 unit	6 unit	71,00
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 unit		2 unit	2 unit	69,28	- unit	- unit	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit				- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
1 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit				- unit	- unit	-	2 unit	2 unit	95,00
1 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 unit				- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
1 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 unit				- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
1 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 unit				- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
1 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit				- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
1 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan	6 unit				- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
1 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit				1 unit	1 unit	84,00	- unit	- unit	-
1 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 unit				17 unit	17 unit	79,33	12 unit	12 unit	83,00
1 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 unit				30 unit	30 unit	97,20	9 unit	9 unit	96,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80.237 orang		80.237 orang	80.237 orang	48,88	58.607 orang	58.607 orang	72,00
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.000 orang		8.000 orang	8.000 orang	75,09	402.925 orang	402.925 orang	79,00
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.900 orang		8.900 orang	8.900 orang	64,62	45.124 orang	45.124 orang	73,00
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.000 orang		2.000 orang	2.000 orang	78,05	168.601 orang	168.601 orang	84,00
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.000 orang		2.000 orang	2.000 orang	86,51	6.452 orang	6.452 orang	89,00
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.000 orang		2.000 orang	2.000 orang	65,09	1.243 orang	1.243 orang	73,00
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.860 orang		4.860 orang	4.860 orang	69,71	6.381 orang	6.381 orang	74,00
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.700 orang		11.700 orang	11.700 orang	56,61	12.810 orang	12.810 orang	75,00
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	-
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	99,77	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	51,35	1 dokumen	1 dokumen	72,00
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	40,61	1 dokumen	1 dokumen	71,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			3	7	8 = (7/6)		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	71,00
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	72,00
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	95,00
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	71,00
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 orang	100 orang	1.243 orang	1.243 orang	71,00
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 orang	100 orang	1.243 orang	1.243 orang	71,00
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	90,00
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	98,00
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	72,00
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	71,00
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	50 orang	- orang	- orang	- orang	-
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	- paket	- paket	- paket	-
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022
			4	5	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			3	7	8 = (7/6)		
1 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	71,00
1 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	85,00
1 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
1 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	96,00
1 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	24 unit	8 unit	5 unit	5 unit	72,00
1 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	- laporan	- laporan	- laporan	-
1 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
1 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	99,00
1 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terlaksana	95 persen	85 persen	90 persen	90 persen	95,00
1 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
1 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	95,00
1 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	- Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	6 unit	2 unit	2 unit	- unit	84,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang terlaksana	95 persen	-	85 persen	85,55	85 persen	90 persen	90 persen	90 persen	71,51	
1 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 unit		1 unit	48,43	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	71,00	
1 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 unit		- unit	-	- unit	- unit	- unit	- unit	-	
1 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit		- unit	-	- unit	- unit	- unit	- unit	-	
1 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen		1 dokumen	59,02	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	72,00	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										98,54	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang terlaksana	85 persen	-	75 persen	80,16	75 persen	80 persen	80 persen	80 persen	88,00	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen		- dokumen	-	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-	
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 laporan		1 laporan	80,16	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	88,00	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang temenuhi	85 persen	-	80 persen	96,98	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022
		2	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (6+7+9)	11 = (10/4)
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen		- dokumen	- dokumen		1 dokumen	99,00
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.002 orang		752 orang	752 orang	97,04	1.002 orang	99,00
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	89,32	- dokumen	95,00
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang terlaksana	80 persen	-	70 persen	70 persen	83,14	75 persen	92,00
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 orang		35 orang	35 orang	83,14	70 orang	92,00
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			-			63,82		80,41
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terlaksana	90 persen	-	80 persen	80 persen	79,29	85 persen	87,58
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	87,05	1 dokumen	90,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3	84 sarana		30 sarana	30 sarana	95,70	64 sarana	98,00	
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		24 sarana		10 sarana	10 sarana	35,22	20 sarana	71,00	
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	90 persen	90 persen		80 persen	80 persen		85 persen	90,00	
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen		- dokumen	- dokumen		1 dokumen	90,00	
1 02 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen		
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 persen	90 persen		80 persen	80 persen	75,39	85 persen	80,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkit Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkit Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkit Daerah tahun 2022	
					Target Renja Perangkit Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkit Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75,39	1 dokumen	80,00
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dikeluarkan	90 persen	90 persen	80 persen	80 persen	85 persen	-	85 persen	-
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dikeluarkan	90 persen	90 persen	80 persen	80 persen	85 persen	-	85 persen	-
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang terneeruhi	90 persen	90 persen	-	80 persen	85 persen	33,12	85 persen	71,00
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	400 unit	400 unit	365 unit	365 unit	385 unit	33,12	385 unit	71,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022
		3	4	5	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	-
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						95,00
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	70 persen	60 persen	65 persen	65 persen	95,00
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	95,00
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Promotif Preventif dalam rangka pelaksanaan sehat TK Daerah Kab/Kota yang terlaksana	70 persen	0	65 persen	65 persen	95,00
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	- dokumen	1 dokumen	1 dokumen	95,00
1 02 05 2.02 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13.100 keluarga	- keluarga	- keluarga	- keluarga	-
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	70 persen	0	65 persen	65 persen	95,00
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	- dokumen	1 dokumen	1 dokumen	95,00

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian pembangunan di Kabupaten Ketapang pada urusan kesehatan dapat dilihat melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Ketapang pada tahun 2015 sebesar 70.51 menjadi 71.11 pada tahun 2021. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Ketapang lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Indonesia pada tahun 2015-2021. Hal tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Selain dari itu, berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan terdapat 12 Indikator jenis layanan yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Dimana capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (*seratus persen*). Saat ini di Kabupaten Ketapang belum ada indikator kinerja SPM yang mencapai target.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Ketapang, Dinas Kesehatan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU Dinas Kesehatan dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. Berdasarkan target Renstra Tahun 2016-2021 terdapat 6 (enam) IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Dimana pencapaian pada tahun 2021 hanya terdapat 3 (tiga) indikator yang mencapai target. Hasil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30) di bawah ini:

Tabel 2.2 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%	100%	100%				
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%	100%	100%				
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%				
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%	100%	100%				
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	100%	100%				
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%	100%	100%				
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%				
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%	100%	100%				
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%	100%	100%				
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%				
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%				
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%				
13	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	-	230	245	230	210	183	180	175	184.4	229	230	210				
14	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	-	20,6	19	18	17	16	15	14	9,4	9,9	18	17				
15	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	-	-	19,5	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	9,7	10,3	18,5	17,5				
16	Prevalensi stunting pada balita	-	27,1	21,1	18,4	16	14	13	12	19,17	16,52	18,4	16				
17	Insidence rate kasus DBD per 100.000 penduduk	-	<49	49	49	49	49	49	49	42,6	2,47	49	49				
18	Prevalensi Hipertensi	-	-	24	21	19	17	16	15	22,37	14,1	21	19				
19	Zonasi pemetaan kasus Covid-19	-	-	Kuning	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Oranye	Kuning	Kuning	Kuning				
20	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	-	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	80%	80%	90%	95%				

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Analisis isu-isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diantaranya peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan *stunting*, pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, Integrasi kepesertaan JKN, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pemulihan dampak kesehatan Pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Isu-isu penting dirumuskan dalam hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Secara rinci pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan kesehatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
		Rendahnya cakupan kunjungan K1
		Rendahnya cakupan kunjungan K4
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Tingginya persentase bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 1
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 3
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
		Tingginya persentase balita gizi buruk
	Tingginya prevalensi stunting	Tingginya persentase balita gizi kurang
		Tingginya persentase ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)
		Rendahnya persentase Desa yang melaksanakan STBM
	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Kurangnya penerapan PHBS
		Tingginya angka kesakitan penyakit menular
		Tingginya kesakitan penyakit tidak menular
	Masih tingginya kasus COVID-19	Rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan
Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa		
Rendahnya edukasi terkait pencegahan COVID-19 kepada masyarakat		
Rendahnya penegakan disiplin terkait protokol kesehatan (prokes) COVID-19		
Rendahnya rasio test dan tracing Covid-19		
Rendahnya frekuensi update dan release data COVID-19 per minggu		
Minimnya ruang isolator di RSUD dr. Agoesdjam		
Minimnya pembaruan dan publikasi data COVID-19		
Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	Rendahnya SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan	
	Masih adanya fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	
	Rendahnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	
		Rendahnya persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemenkes

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dijabarkan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya wilayah Kabupaten Ketapang - Sarana Prasarana layanan kesehatan belum memadai dan masih ada Desa belum memiliki Poskesdes atau Bidan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang
2	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, jenis dan distribusi SDM Kesehatan belum merata - Alur Sistem rujukan masih belum sesuai karena terhambat oleh infrastruktur yang kurang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan DAK Fisik dan Non Fisik dalam upaya penurunan AKI dan AKB - Meningkatnya upaya pihak swasta dalam upaya pemberian layanan kesehatan melalui penderian Klinik Swasta Perusahaan
3	Rendahnya kualitas kesehatan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Kesehatan masih kurang - <i>Policy/ Regulasi</i> masih kurang - Koordinasi lintas program belum terpadu - Adat istiadat yang memberi pengaruh <i>negative</i> pada perilaku masyarakat 	
4	Tingginya <i>prevalensi stunting</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dilakukan kajian faktor risiko kejadian stunting di Ketapang sehingga saat ini belum diketahui secara pasti faktor penyebab utama kejadian stunting di Ketapang - Belum adanya regulasi pada tingkat daerah yang mendukung upaya penanggulangan stunting - Koordinasi lintas program belum terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan DAK Fisik dan Non Fisik dalam upaya penanggulangan Stunting

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
5	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan <i>re emerging diseases</i> - Policy/Regulasi masih kurang - Jaminan kesehatan belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat - Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) - Belum tersedianya Tenaga Dokter Spesialis Jiwa di tingkat Kabupaten dan tenaga perawat jiwa di Puskesmas - Belum ada Puskesmas Rawat Jiwa di Tingkat Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pelaksanaan program semakin berkembang sehingga memunculkan tools baru yang memudahkan pelaksanaan program - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap Kelurahan/Desa - Jumlah sebaran Posbindu yang semakin meningkat - Dukungan lintas sektor untuk pelaksanaan program dan peluang integrasi dengan program lain
6	Masih tingginya kasus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya mobilisasi masyarakat - Adanya tenaga kerja asing mobilisasi yang keluar masuk ke Kabupaten Ketapang - Adanya potensi masuknya penyakit dari luar karena akses transportasi dari luar yang mudah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Dukungan lintas sector sudah mulai berjalan baik
7	Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan akreditasi pada Puskesmas - Keterbatasan SDM sebagai tim pendamping Akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya tuntutan jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat - Permenkes nomor tentang 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri dokter dan Tempat Praktek Mandiri dokter gigi - Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes NOmor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan

Globalisasi merupakan tantangan maupun ancaman bagi kesehatan masyarakat. Perlu kesiapan tenaga kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi (MEA).

Salah satu peluang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ketapang, yakni saat ini terdapat sebanyak 74 perusahaan perkebunan yang tersebar di 18 Kecamatan. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan secara terintegrasi yang melibatkan dunia usaha berupa peningkatan pemberdayaan sosial dan lingkungan perusahaan di bidang kesehatan. Sudah terdapat Peraturan bersifat operasional dan mengatur secara spesifik fungsi dan peran pihak perusahaan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang hingga pada tingkat Kecamatan dan Desa. Dengan meningkatnya peran pihak perusahaan diharapkan akan terjadi keterpaduan, koordinasi dan kerjasama sektoral yang lebih intens dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

3. Formulasi isu-isu penting

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah **“Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviuw rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil reviuw terhadap rancangan awal RKPD untuk OPD Dinas Kesehatan diketahui bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD sehingga telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Secara rinci reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang untuk Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.31) di bawah ini :

Tabel 2.5 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				337.597.903.640,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				250.000.000.000,00	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				140.000.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				136.563.795.080,33	
		Dinas Kesehatan	- Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B			Dinas Kesehatan	- Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	B		
		Dinas Kesehatan	- Nilai IKM Dinas Kesehatan	B			Dinas Kesehatan	- Nilai IKM Dinas Kesehatan	B		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.61.856.653.640,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				85.704.655.933,26	
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan	80%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan	80%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K1	95%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K1	95%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K4	82%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K4	82%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	4,40%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	4,40%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 1	98%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 1	98%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 3	92%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 3	92%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	84%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	84%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan balita gizi buruk	0,20%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan balita gizi buruk	0,20%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan ibu hamil yang kekurangan energi kronik (KEK)	11,50%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan ibu hamil yang kekurangan energi kronik (KEK)	11,50%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan gizi balita kurang	7%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan gizi balita kurang	7%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan Desa STBM	68%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan Desa STBM	68%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan penerapan PHBS	88%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan penerapan PHBS	88%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan pengetahuan tentang PHBS	88%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan pengetahuan tentang PHBS	88%		
		Dinas Kesehatan	- Incidence rate penyakit HIV/AIDS per 1.000 penduduk	0,02%			Dinas Kesehatan	- Incidence rate penyakit HIV/AIDS per 1.000 penduduk	0,02%		
		Dinas Kesehatan	- Case Notification Rate penyakit TB Paru per 100.000 penduduk	97%			Dinas Kesehatan	- Case Notification Rate penyakit TB Paru per 100.000 penduduk	97%		
		Dinas Kesehatan	- Rasio Test dan Tracing Covid-19 Per 1000 Jumah Penduduk	0,70%			Dinas Kesehatan	- Rasio Test dan Tracing Covid-19 Per 1000 Jumah Penduduk	0,70%		

		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kapasitas pelayanan laboratorium 	86%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kapasitas pelayanan laboratorium 	86%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi update dan release data COVID-19 per minggu 	5%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi update dan release data COVID-19 per minggu 	5%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi penyakit Diabetes 	65%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi penyakit Diabetes 	65%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan 	88%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan 	88%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan 	70%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan 	70%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemendes 	81%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemendes 	81%	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				29.291.850.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				27.070.824.686,41
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan sesuai standar 	86%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan sesuai standar 	86%	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1.207.500.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				402.727.100,00
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial 	91%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial 	91%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 	46,3%				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 	46,3%	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.241.900.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				257.997.200,00
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 	58%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 	58%	
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kasus pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang diberikan sanksi administratif 	34%			Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kasus pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang diberikan sanksi administratif 	34%	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan, Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan sepanjang anggaran mampu mengakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang Kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, seperti tersaji dalam Tabel 2.6. (T-C.32) di bawah ini :

Tabel 2.6 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Dusun	Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</p> <p>Pembangunan Rumah Sakit Type D</p> <p>Pembangunan Puskesmas</p> <p>Pembangunan Puskesmas Pembantu</p> <p>Pembangunan Puskesmas Pembantu</p> <p>Pembangunan Puskesmas Pembantu</p> <p>Pembangunan Puskesmas Pembantu</p> <p>Pembangunan Puskesmas Pembantu</p> <p>Relokasi Puskesmas Pembantu</p> <p>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</p> <p>Pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan Lainnya</p> <p>Pembangunan Pagar Pustu, Polindes dan Posyandu</p> <p>Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Pembantu</p>				<p>Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi</p> <p>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</p> <p>1 Paket</p> <p>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p>		
		Suka Karya		Marau			
		Labai Hilir		Simpang Hulu			
		Selangkut Raya		Sungai Laur			
		Tanah Hitam		Singkup			
		Pantai Ketikal		Singkup			
		Cegolak		Nanga Tayap			
		Sepotong		Sungai Laur			
		Mekar Raya		Simpang Dua			
		Mekar Jaya		Sungai Melayu Rayak			
		Muntai		Singkup			

<p>Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</p>	<p>Tanjung Medan</p>	<p>Nanga Tayap</p>	<p>1 Paket</p>	<p>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</p>
<p>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Penambahan Ruang Pelayanan Kesehatan Pustu</p>	<p>Sunge Bengaras</p>	<p>Hulu Sungai</p>	<p>1 Paket</p>	<p>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</p>
<p>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Desa Lembah Hijau Satu Kecamatan Nanga Tayap Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Pengadaan Timbunan Halaman Puskesmas Tuan-Tuan Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong</p>	<p>Lembah Hijau Satu Sandai Kiri Mulia Kerta</p>	<p>Nanga Tayap Sandai Benua Kayong</p>	<p>1 Paket 1 Paket 1 Paket</p>	<p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</p>
<p>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu</p>	<p>Laman Satong Sukaraja Bukit Kelambing Suka Sari Sukaraja</p>	<p>Matan Hilir Utara Singkup Singkup Singkup Singkup</p>	<p>1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket</p>	<p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya</p>
<p>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Teluk Runjai</p>	<p>Jelai Hulu</p>	<p>1 Paket</p>	<p>Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</p>
<p>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Suka Karya</p>	<p>Marau</p>	<p>1 Paket</p>	<p>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</p>

<p>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Poskesdes Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Poskesdes Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Poskesdes Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Poskesdes Pengadaan Alat Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu</p>	<p>Bayun Sari Sari Bekayas Harapan Baru Harapan Baru Riam Danau Kanan Riam Danau</p>	<p>Sungai Laur Air Upas Sungai Laur Air Upas Jelai Hulu Jelai Hulu</p>	<p>1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket</p>
<p>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p>			
<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar untuk Bayi / Balita</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar untuk Lansia</p>	<p>Kuala Satong Kuala Satong</p>	<p>Matan Hilir Utara Matan Hilir Utara</p>	<p>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana</p> <p>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p>
<p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</p>	<p>Kayang Tuhe</p>	<p>Nanga Tayap</p>	<p>Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang terpenuhi</p> <p>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Visi Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada tiga pilar pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter.

Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Dimana Kementerian Kesehatan melaksanakan misi yang ke satu yakni “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” dan misi kedua yakni “Penguatan Struktur Ekonomi

yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Secara rinci Misi Presiden terkait kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate)

Merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar,

pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Kementerian Kesehatan menetapkan delapan Sasaran Strategis dalam rangka mencapai lima Tujuan Strategis. Matrik Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	2	3
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	- Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan - Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar - Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih - Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Dalam rangka perumusan kebijakan kesehatan, setiap tahunnya Kementerian Kesehatan melakukan rapat kerja tahunan atau Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Pada Rakerkesnas Tahun 2020 dibahas 5 (lima) fokus masalah kesehatan diantaranya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pengendalian *Stunting*, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Germas, dan Tata Kelola Sistem Kesehatan. Dimana 5 (lima) masalah kesehatan tersebut di arahkan pada konteks pendekatan promotif dan preventif. Selain dari itu, dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), arah kebijakan bidang kesehatan mulai dari tingkat Pusat hingga ke daerah difokuskan kepada pemulihan dampak kesehatan dari pandemi Covid-19.

Untuk Sinergisitas Perencanaan antara Pusat dan Daerah, Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Kabupaten Ketapang mempedomani Renstra yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Selain dari itu Dinas Kesehatan juga mengikuti strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang menekankan pada perubahan (*transformasi*) dan percepatan (*akselerasi*) dengan prioritas pada misi ke-3 yaitu **“Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing”**.

B. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif, sehingga pencapaian terget merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya

merupakan *benefits* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah “**meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**”, dengan indikator tujuan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari kondisi awal 71.10 menjadi 71.56 tahun di masa akhir yakni tahun 2026.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional/dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, berorientasi hasil dan dapat dicapai pada periode waktu tertentu.

Penentuan sasaran Dinas Kesehatan untuk Rencana Kerja tahun 2023 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 yang dipadukan dengan kondisi saat ini. Sasaran Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun periode 2021 – 2026 disertai dengan indikator kerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dijadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi Bupati Ketapang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menetapkan sasaran yakni:

- a. meningkatnya kualitas kesehatan ibu
- b. meningkatnya kualitas kesehatan bayi
- c. meningkatnya kualitas kesehatan balita
- d. menurunnya *prevalensi stunting*
- e. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- f. menurunnya kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- g. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Secara rinci rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	210
		Meningkatnya kualitas kesehatan bayi	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	17
		Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Angka kematian balita (per 1000 balita)	17,5
		Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting pada balita	16
		Meningkatnya kualitas kesehatan	<i>Insidence Rate</i> kasus DBD	49
			<i>Prevalensi</i> hipertensi	19
		Menurunnya kasus Covid-19	Zonasi pemetaan kasus Covid-19	Kuning
		Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	95%

C. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, penentuan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2021-2026 memiliki program prioritas yang tertuang didalam lima panca karya. Dimana Panca Karya tersebut difokuskan pada upaya pencapaian: a) Ketapang Sehat, b) Ketapang Cerdas, c) Ketapang Nyaman, d) Ketapang Peduli dan e) Ketapang Sejahtera.

Sesuai dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, Dinas kesehatan melaksanakan panca karya “ketapang sehat”, yang merupakan panca karya yang pertama. Terdapat lima fokus penting dalam rangka implementasi panca karya Ketapang Sehat diantaranya:

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya);
2. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular;
3. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya;

4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan;
5. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang.

Dalam upaya pelaksanaan Panca Karya Ketapang sehat sehingga dapat dimunculkan kerangka pembiayaan, Fokus kegiatan tersebut perlu dilakukan *mapping* kedalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Fokus	Program dalam Kepmendagri 050-5889
1	2	3
1	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya)	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya	- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
4	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
5	Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan program prioritas yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Ketapang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 terbagi dalam dua jenis, yaitu Program Penunjang dan Program Urusan Bidang Kesehatan. Secara Rinci sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Sediaan Farmasu, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program dan Kegiatan Penunjang

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8) Peningkatan Pelayanan BLUD

Secara rinci rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel 3.4 (T-C.33) di bawah ini:

Tabel 3.4 (T-C.33)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				250.000.000.000,00				390.832.195.957,77
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				250.000.000.000,00				390.832.195.957,77
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				136.563.795.080,33				160.694.932.361,77
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	90 persen	895.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		95 persen	984.499.993,00
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	8 dokumen	220.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		8 dokumen	242.000.000,00
X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	100.000.000,00	DAU		1 dokumen	109.999.993,00
X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	75.000.000,00	DAU		1 dokumen	82.500.000,00
X XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	75.000.000,00	DAU		1 dokumen	82.500.000,00
X XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	75.000.000,00	DAU		1 dokumen	82.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	6 laporan	275.000.000,00	DAU		6 laporan	302.500.000,00
X XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1 laporan	75.000.000,00	DAU		1 laporan	82.500.000,00
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 persen	106.190.425.434,73	DAU		100 persen	127.522.977.930,00
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	784 orang / bulan	105.849.425.434,73	DAU		784 orang / bulan	127.147.877.930,00
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	4 dokumen	55.000.000,00	DAU		4 dokumen	60.500.000,00
X XX 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	55.000.000,00	DAU		1 dokumen	60.500.000,00
X XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	3 laporan	55.000.000,00	DAU		3 laporan	60.500.000,00
X XX 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Dinas Kesehatan	4 laporan	110.000.000,00	DAU		4 laporan	121.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	2 dokumen	22.000.000,00	DAU		2 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan	90 persen	154.000.000,00	DAU		95 persen	169.400.000,00
X XX 01 203 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 203 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 203 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00
X XX 01 203 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00
X XX 01 203 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00
X XX 01 203 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00
X XX 01 203 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan	90 persen	320.000.000,00	DAU		95 persen	352.000.000,00
X XX 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	1 unit	22.000.000,00	DAU		1 unit	24.200.000,00
X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kesehatan	1 paket	100.000.000,00	DAU		1 paket	110.000.000,00
X XX 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X XX 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Dinas Kesehatan	10 orang	22.000.000,00	DAU		10 orang	24.200.000,00	
X XX 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00	
X XX 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Dinas Kesehatan	10 orang	22.000.000,00	DAU		10 orang	24.200.000,00	
X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	10 orang	22.000.000,00	DAU		10 orang	24.200.000,00	
X XX 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	10 orang	22.000.000,00	DAU		10 orang	24.200.000,00	
X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	10 orang	22.000.000,00	DAU		10 orang	24.200.000,00	
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	626.000.000,00	DAU		95 persen	941.600.000,00	
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	60.000.000,00	DAU		1 paket	121.000.000,00	
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	22.000.000,00	DAU		1 paket	24.200.000,00	
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	22.000.000,00	DAU		1 paket	24.200.000,00	
X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	80.000.000,00	DAU		1 paket	121.000.000,00	
X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	32.500.000,00	DAU		1 paket	90.750.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	16.500.000,00	DAU		1 dokumen	18.150.000,00
X XX 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	22.000.000,00	DAU		1 paket	24.200.000,00
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	2 laporan	285.000.000,00	DAU		2 laporan	423.500.000,00
X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	42.000.000,00	DAU		1 dokumen	46.200.000,00
X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	22.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.200.000,00
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan	90 persen	1.450.000.000,00	DAU		95 persen	1.556.500.000,00
X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 unit	600.000.000,00	DAU		1 unit	660.000.000,00
X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 unit	600.000.000,00	DAU		1 unit	660.000.000,00
X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 unit	200.000.000,00	DAU		1 unit	181.500.000,00
X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 unit	50.000.000,00	DAU		1 unit	55.000.000,00
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	2.142.014.900,00	DAU		95 persen	4.343.216.390,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	1 laporan	24.095.700,00	DAU		1 laporan	48.505.270,00
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 laporan	1.050.000.000,00	DAU		1 laporan	1.470.000.000,00
X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 laporan	22.000.000,00	DAU		1 laporan	24.200.000,00
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 laporan	1.045.919.200,00	DAU		1 laporan	2.800.511.120,00
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	832.000.000,00	DAU		95 persen	1.777.877.200,00
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	20 unit	22.000.000,00	DAU		20 unit	-
X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	6 unit	10.000.000,00	DAU		6 unit	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan			DAU			
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/ Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 unit	800.000.000,00	DAU		2 unit	1.777.877.200,00
X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah			DAU			-
X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah			DAU			-
X XX 01 2,10	Peningkatan Pelayanan BLOOD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLOOD yang terpenuhi	24 Puskesmas	90 persen	23.954.354.745,60	DAU		95 persen	23.046.860.848,77
X XX 01 2,10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	- Jumlah BLOOD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 Puskesmas	24 unit kerja	23.954.354.745,60	DAU		24 unit kerja	23.046.860.848,77
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				113.436.204.919,67				230.137.263.596,00
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				85.704.655.933,26				184.069.870.701,00
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	Kabupaten Ketapang	90 persen	39.820.226.725,20	DAU & DAK FISIK		95 persen	132.941.361.743,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kecamatan Tumbang Titi	1 unit	10.300.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	36.300.000.000,00
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Manis Mata	1 unit	7.000.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	29.260.785.736,00
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	3.704.837.095,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	7.375.320.805,00
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya	12 unit	1.500.000.000,00	DAU & DAK FISIK		12 unit	2.161.798.826,00
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RS Pratama Kecamatan Sandai	1 unit	100.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	110.000.000,00
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Puskesmas beserta jaringannya	4 unit	385.000.000,00	DAU & DAK FISIK		4 unit	423.500.000,00
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	4 unit	100.000.000,00	DAU & DAK FISIK		4 unit	110.000.000,00
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RS Pratama Kecamatan Sandai	1 unit	100.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	110.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Puskesmas beserta jaringannya	2 unit	263.000.000,00	DAU & DAK FISIK		2 unit	399.300.000,00
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	100.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	110.000.000,00
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya	12 unit	100.000.000,00	DAU & DAK FISIK		12 unit	110.000.000,00
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 unit	500.000.000,00	DAU & DAK FISIK		2 unit	121.000.000,00
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 unit	3.853.850.727,80	DAU & DAK FISIK		2 unit	12.269.235.801,00
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	3 unit	4.667.893.799,50	DAU & DAK FISIK		3 unit	32.634.683.179,00
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 unit	329.010.000,00	DAU & DAK FISIK		2 unit	361.911.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	- Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	3.555.577.991,00	DAU & DAK FISIK		1 paket	3.911.135.790,00
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	- Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	2.111.057.111,90	DAU & DAK FISIK		1 paket	3.111.057.112,00
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	200.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	220.000.000,00
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	500.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	3.346.633.494,00
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	75.000.000,00	DAU & DAK FISIK		1 unit	82.500.000,00
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	75.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 paket	82.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.01 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 keluarga	300.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		100 keluarga	330.000.000,00
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 persen	44.793.660.495,56	DAU & DAK NON FISIK		100 persen	49.688.288.374,00
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	10.270 orang	508.497.000,00	DAU & DAK NON FISIK		10.270 orang	111.869.340,00
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	9.850 Ibu Bersalin	3.841.016.300,00	DAU & DAK NON FISIK		9.850 Ibu Bersalin	845.023.586,00
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8.809 Orang	500.478.000,00	DAU & DAK NON FISIK		8.809 Orang	550.525.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	45.850 balita	233.013.000,00	DAU & DAK NON FISIK		45.850 balita	256.314.300,00
1 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	80.237 orang	253.952.613,20	DAU & DAK NON FISIK		80.237 orang	7.821.740,00
1 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8.000 orang	1.861.052.633,80	DAU & DAK NON FISIK		8.000 orang	984.887.369,00
1 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8.900 orang	420.795.113,20	DAU & DAK NON FISIK		8.900 orang	138.862.387,00
1 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000 orang	629.100.000,00	DAU & DAK NON FISIK		2.000 orang	151.353.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000 orang	460.905.000,00	DAU & DAK NON FISIK		2.000 orang	160.288.650,00
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000 orang	703.245.275,00	DAU & DAK NON FISIK		2.000 orang	465.404.461,00
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	4.860 orang	357.390.000,00	DAU & DAK NON FISIK		4.860 orang	117.938.700,00
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	11.700 orang	284.285.000,00	DAU & DAK NON FISIK		11.700 orang	126.814.050,00
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	75.000.000,00	DAU		1 dokumen	82.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	78.441.000,00	DAU		1 dokumen	86.285.100,00
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	2.098.593.316,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	549.690.529,00
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	367.796.660,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	121.372.898,00
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	1.926.009.052,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	6.657.219.914,00
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	1.796.664.069,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	3.956.330.476,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	216.779.200,00	DAU		1 dokumen	238.457.120,00
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	4 dokumen	9.530.840,418,00	DAU & DAK NON FISIK		4 dokumen	8.819.233.925,00
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 orang	221.345.320,00	DAU & DAK NON FISIK		100 orang	156.394.212,00
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 orang	103.494.400,00	DAU & DAK NON FISIK		100 orang	105.703.152,00
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	93.750.000,00	DAU		1 dokumen	143.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	35.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	60.500.000,00
1 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	3 dokumen	1.360.591.700,00	DAU & DAK NON FISIK		3 dokumen	1.097.035.761,00
1 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 dokumen	10.085.028.000,00	DAU		2 dokumen	13.069.713.600,00
1 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	50 orang	45.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		50 orang	49.500.000,00
1 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	75.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 paket	82.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kesehatan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	55.000.000,00
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 unit	1.900.000.000,00	DAU & DAK FISIK		2 unit	1.850.000.000,00
1 02 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 dokumen	175.000.000,00	DAU		1 dokumen	120.999.812,00
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RumahSakit	RS Pratama Kecamatan Sandai	1 dokumen	844.817.181,00	DAU		1 dokumen	1.013.780.617,00
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	Puskesmas beserta jaringannya	1 dokumen	1.296.066.845,26	DAU		1 dokumen	573.533.136,00
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 dokumen	929.298.899,10	DAU		2 dokumen	1.022.228.789,00
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	3 unit	750.414.500,00	DAU & DAK NON FISIK		3 unit	3.245.455.950,00
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laboratorium Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 laporan	25.000.000,00	DAU		1 laporan	30.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	DAU		1 dokumen	24.000.000,00
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan & PSC 119	1 unit	640.000.000,00	DAU		1 unit	2.560.000.000,00
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	95 persen	773.268.712,50	DAU		95 persen	685.595.584,00
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	204.000.000,00	DAU		1 dokumen	224.400.000,00
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	309.269.614,50	DAU		1 dokumen	340.196.576,00
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	- Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	259.999.098,00	DAU		1 unit	120.999.008,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	95 persen	317.500.000,00	DAU		95 persen	754.625.000,00
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	- Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	40.000.000,00	DAU		1 unit	110.000.000,00
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan & RS Pratama Kecamatan Sandai	1 unit	15.000.000,00	DAU		1 unit	16.500.000,00
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	205.000.000,00	DAU		1 unit	480.000.000,00
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	57.500.000,00	DAU		1 dokumen	148.125.000,00
1 02 03	PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				27.070.824.686,41				44.953.524.315,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	85 persen	50.000.000,00	DAU		90 persen	154.000.000,00
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	DAU		1 dokumen	22.000.000,00
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 laporan	30.000.000,00	DAU		1 laporan	132.000.000,00
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	85 persen	25.761.824.686,41	DAU		90 persen	41.165.124.315,00
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	40.000.000,00	DAU		1 dokumen	44.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	837 orang	25.561.824.686,41	DAU		837 orang	40.763.624.315,00
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	13 Orang 24 pusk	160.000.000,00	DAU		13 Orang 24 pusk	357.500.000,00
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	80 persen	1.259.000.000,00	DAU		85 persen	3.634.400.000,00
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	150 orang	1.259.000.000,00	DAU		150 orang	3.634.400.000,00
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				402.727.100,00				719.077.260,00
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	82.701.400,00	DAU		95 persen	164.891.540,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	46.000.000,00	DAU		1 dokumen	111.320.000,00
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 sarana	20.493.900,00	DAU		1 sarana	24.743.290,00
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 sarana	16.207.500,00	DAU		1 sarana	28.828.250,00
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat Sertifikat Produksi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	52.000.000,00	DAU		95 persen	57.200.000,00
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	26.000.000,00	DAU		1 dokumen	28.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	26.000.000,00	DAU		1 dokumen	28.600.000,00
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	120.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		95 persen	235.157.450,00
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	120.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	235.157.450,00
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dikeluarkan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	20.000.000,00	DAU		95 persen	22.000.000,00
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	DAU		1 dokumen	22.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dikeluarkan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	20.000.000,00	DAU		95 persen	22.000.000,00
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	DAU		1 dokumen	22.000.000,00
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	90 persen	108.025.700,00	DAU & DAK NON FISIK		95 persen	217.828.270,00
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post-Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 unit	86.108.700,00	DAU & DAK NON FISIK		2 unit	171.719.570,00
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	21.917.000,00	DAU		1 dokumen	46.108.700,00
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN				257.997.200,00				394.791.320,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	70 persen	97.997.200,00	DAU & DAK NON FISIK		75 persen	151.796.920,00
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	97.997.200,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	151.796.920,00
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Promotif Preventif dalam rangka pelaksanaan sehat TK Daerah Kab/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	70 persen	130.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		75 persen	209.994.400,00
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	65.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	104.997.200,00
1 02 05 2.02 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	50 keluarga	65.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		50 keluarga	104.997.200,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	70 persen	30.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		75 persen	33.000.000,00
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	30.000.000,00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	33.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kesehatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kesehatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten Ketapang, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V

PENUTUP

- A. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari Visi, misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2021-2026.
- B. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
- C. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
- D. Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Ketapang, 2022
Kepala Dinas Kesehatan

H. RUSTAMI, SKM., M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630512 198511 1 003